



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

14 Desa Rawan Penyalahgunaan DD

KEPAHIANG – Sebanyak 14 desa di Kabupaten Kepahiang saat ini menjadi fokus audit oleh Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Kepahiang. Pasalnya 14 desa tersebut disinyalir rawan terhadap penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahun 2019.

Diungkapkan Kepala Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Kepahiang, Harun, SE, AK, M.Si, difokuskannya audit terhadap 14 desa tersebut berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan beberapa

waktu lalu. Menurutnya dari 105 desa di Kabupaten Kepahiang, ada 14 rawan terjadi temuan penyalahgunaan DD.

“Untuk itu kita akan lakukan audit, dan minta temuan itu dikembalikan. Hanya saja saat ini kita belum bisa beberkan desa mana saja itu, dan berapa temuan yang sudah kita dapatkan,” jelas Harun.

Harun mengakui, untuk tahun ini banyak Kades di Kabupaten Kepahiang terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum, lantaran pengelo-

laan DD. Untuk itu saat ini Ipda melakukan langkah dengan merubah pola audit. Jika sebelumnya setelah tahun anggaran, tapi kini tengah tahun anggaran sedang berjalan. “Ini dilakukan agar proses realisasi DD bisa maksimal. Kalaupun ada temuan kerugian negara bisa segera dikembalikan,” bebernya.

Ada dua macam pola audit yang akan dilakukan Ipda Kepahiang. Yakni *post audit* dan *current audit*. *Post audit* merupakan audit setelah

tahun anggaran berakhir. Sementara *current audit* dilakukan saat tahun anggaran sedang berjalan.

“Kalau post audit, itu temuan yang ada sulit dikembalikan. Hal ini terjadi dari kasus-kasus penyalahgunaan DD yang ada selama ini. Yakni kerugian negara tidak sanggup dikembalikan oleh aparat desanya,” bebernya.

Lanjut Harun, sejauh ini proses audit masih terus berlangsung. Dari 14 desa tersebut, baru 6 desa yang sudah se-

lesai audit. Dan ditemukan ada beberapa kerugian negara. Namun demikian temuan tersebut langsung ditindaklanjuti Ipda kepada pihak desa, agar segera dikembalikan sebelum tahun anggaran berakhir.

“Masih ada beberapa desa lagi yang belum kita audit. Target kita, sebelum tahun anggaran berakhir, seluruh desa sampel tersebut sudah selesai diaudit, dan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari pengelolaan DD-nya,” singkatnya. (sly)